

Pembukaan Muktamar PPP Ricuh

Dari Halaman 1

lokasi. Berdasarkan pantauan di lokasi, dua kubu bertentangan saling adu teriak di arena muktamar tersebut. Momen itu berawal ketika Mardiono akan memberikan sambutan, tiba-tiba ada sejumlah kader berdiri dan berteriak. "Turun," seru sejumlah kader. Mardiono lalu berhenti memberi sambutan. Ada momen saling teriak dan dorong setelahnya. Pembawa acara lalu meminta para peserta untuk kembali ke tempat duduk. Setelah beberapa saat, situasi mulai kondusif dan Mardiono kembali melanjutkan memberi sambutan. Sesekali, kader meneriaki Mardiono, ada juga yang bertepuk tangan. Kemudian ada pula yang berteriak, "Ketua baru, ketua baru". Juga ada yang berseru keras meneriakan, "Perubahan-perubahan".

Pada momen yang bersamaan, dari kubu lain ada yang berteriak, "Lanjutkan!" Sebelumnya, Mardiono mengatakan, ada tiga agenda dalam Muktamar X PPP. Pertama menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama lima tahun. Kedua, pembahasan rencana-rencana kerja PPP untuk lima tahun ke depan. "Terakhir adalah membentuk struktur organisasi baru, jadi nanti-nanti di dalam struktur itu akan ada baru dari mulai ketua umum, wakil ketua umum, bendahara umum dan seterusnya. Semuanya itu baru akan dibentuk nanti besok di Muktamar itu, jadi hakikatnya ada tiga hal itu yang harus dilaksanakan," kata Mardiono. **Kader Diminta Tahan Diri** Sementara, Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi meminta agar para peserta Muktamar X PPP menahan diri dan berperilaku sesuai ajaran agama Islam. Menurutny, perbedaan pendapat pasti ada

dalam pemilihan ketua umum. Dalam Muktamar X PPP hari ini, Sabtu (27/9), sempat terjadi keriuhan. "Namun, bedanya ada yang mengedepankan kesantunan dan ada yang tidak. Jadi kami minta untuk semua muktamirin menahan diri untuk tidak mencederai proses pelaksanaan Muktamar X," kata Rusli, di Ancol, Jakarta. Rusli mengatakan PPP yang notabenehnya partai Islam tidak sepatutnya mengedepankan perkelahian dan keributan. "Kalau maunya ribut terus dan hanya cari sensasi saja bagaimana mau mendapatkan simpati dari umat," ujarnya. Rusli mengingatkan, jangan sampai PPP kembali dalam konflik internal seperti beberapa tahun lalu. "Saya rasa konflik itu hanya membuat kita semakin jauh dengan masyarakat dan merupakan satu hal yang menyebabkan PPP ada di titik ini. Semoga tidak terulang kembali," ujarnya.(gnt/js)

Menanti Keterangan Sang Gubernur di

Dari Halaman 1

pertanyaan lebih besar: siapa sesungguhnya pengendali permainan? Pertanyaan itu semakin mengemuka setelah majelis hakim meminta jaksa KPK menghadirkan Gubernur Sumatera Utara dan Pj Sekda Sumut saat itu, sebagai saksi. Permintaan ini langsung menyulut sorotan publik. Apakah kehadiran seorang kepala daerah di ruang sidang Tipikor akan menjadi kunci untuk membuka simpul korupsi yang lebih besar, atau justru hanya menjadi episode dramatis tanpa makna hukum yang kuat? Secara yuridis, langkah ini sah dan wajar. KU-HAP memberi ruang kepada pengadilan untuk memanggil siapa pun yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa, termasuk pejabat tinggi. Dalam konteks kasus ini, hakim ingin mendalami dugaan adanya pergeseran anggaran dari sejumlah dinas ke Dinas PUPR. Di titik inilah keterlibatan gubernur dianggap relevan, karena setiap kebijakan strategis terkait anggaran daerah tidak mungkin berjalan tanpa otoritas kepala daerah. Dengan kata lain, memanggil Gubsu bukanlah sekadar gimmick, melainkan upaya mengurai alur kebijakan yang melatari kasus suap ini. Namun, secara hukum, kehadiran saksi kelas berat tidak otomatis membuat perkara lebih

terang. Saksi hanya bisa menerangkan sejauh yang ia ketahui. Jika keterangan yang diberikan sebatas formalitas—pergeseran anggaran adalah prosedur sah dalam tata kelola keuangan daerah, tanpa menyentuh siapa yang memanfaatkan celah kebijakan—maka sidang tidak akan banyak berbeda dari sebelumnya. Keterangan saksi akan benar-benar berarti hanya bila mampu dihubungkan dengan bukti lain: dokumen resmi, notulen rapat, komunikasi antarpejabat, atau kesaksian lain yang mengaitkan perintah politik dengan praktik koruptif di lapangan. Di sisi lain, pemanggilan ini memiliki bobot moral dan politik yang besar. Publik selama ini merasa jenuh dengan pola persidangan korupsi yang berhenti di level pelaksana. Kepala dinas ditangkap, kontraktor dipenjara, tetapi rantai perintah di atasnya tak pernah terungkap. Kehadiran seorang gubernur di kursi saksi dapat mengirim pesan penting: tidak ada jabatan yang kebal dari proses hukum. Ini sekaligus menguji komitmen KPK dan pengadilan untuk benar-benar menelusuri "sutradora" di balik drama korupsi, bukan hanya menyalahkan aktor di panggung depan. Tetapi di sinilah tantangan terbesarnya. Saksi pejabat tinggi sering kali memiliki ruang manuver untuk bersikap hati-hati, bahkan defensif. Mereka dapat berlindung pada prosedur birokra-

si, menggunakan bahasa normatif, atau mengalihkan tanggung jawab ke pejabat bawahan. Tanpa kecermatan jaksa dan keberanian hakim untuk mengajukan pertanyaan tajam, persidangan berisiko berakhir dengan jawaban diplomatis yang tak menyingkap apa pun. Karena itu, urgensi pemanggilan ini tidak hanya terletak pada kehadiran sosok besar, melainkan pada kualitas pemeriksaan di ruang sidang. Jika jaksa mampu menautkan keterangan gubernur dengan bukti konkret, maka terang benđeranglah jalur bagaimana kebijakan daerah bisa bertransformasi menjadi ladang suap. Namun bila pertanyaan hanya berputar di permukaan, publik akan kembali disugahi tontonan tanpa substansi. Pengadilan Tipikor kini dihadapkan pada kesempatan langka. Menghadirkan seorang kepala daerah bukanlah hal rutin, dan momentum ini bisa menjadi penentu arah kasus: apakah ia akan tercatat sebagai perkara yang berhasil menyingkap jaringan kekuasaan, atau hanya menambah daftar panjang drama hukum yang berhenti di level teknis. Publik menanti dengan penuh harap—dan sekaligus penuh curiga. Semuanya bergantung pada keberanian: keberanian jaksa untuk menggali, keberanian hakim untuk menegakkan, dan keberanian saksi untuk berkata jujur. Tanpa itu, cahaya yang diharapkan hanya akan berubah menjadi bayang-bayang.(*)

Bobby Bakal Diperiksa

Dari Halaman 1

ada pergeseran begitu ya, pergeseran anggaran. Terkait dengan permintaan untuk menghadirkan saksi, seperti itu, itu adalah hal yang lumrah ya," ujar Plt Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, seperti dikutip pada Jumat (26/9/2025). Asep mengatakan, pihaknya masih menunggu jaksa penuntut umum (JPU) untuk menyampaikan hasil persidangan yang berlangsung. Jika ada permintaan yang diajukan pada saat persidangan, KPK akan menindaklanjuti. "Jaksa setelah sidang ini akan membuat laporan

di persidangan laporan seperti apa, misalkan ada permintaan, ya kita tinggal menindaklanjuti, seperti itu," sebutnya. "Setelah itu, ya tentunya kami juga akan diskusikan ini dengan pimpinan untuk sidang di minggu depan kan ya, minggu depan seperti itu," tambahnya. Asep menjelaskan, jika permintaan hakim itu akan dipenuhi, Bobby akan langsung dihadirkan di ruang sidang. Tak perlu ada pemeriksaan lebih dulu di Jakarta. "Apabila akan dipenuhi, apakah diperiksanya akan dibawa ke Jakarta? Tidak, itu langsung biasanya. Karena tahapnya kan sudah di persidangan. Jadi saksi-saksi yang diminta di persidangan

itu langsung dihadirkan di persidangan," sebutnya. Pengusutan dugaan korupsi terkait proyek jalan di Sumut ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan lima orang tersangka, yakni: - Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Provinsi Sumut - Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut - Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut - M Akhirun Pilang (KIR), Dirut PT DNG - M Rayhan Dulasma Pilang (RAY), Direktur PT RN.(det/js)

Razia THM di Capital Dituding 'Masuk Angin'

Dari Halaman 1

juga menjabat sebagai Ketua DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kota Medan ini, razia yang dilakukan harusnya menghasilkan output yang maksimal. Sebab, razia tersebut tetap menggunakan dana operasional dari anggaran negara, yang notabenehnya adalah uang rakyat. "Jadi, sekecil apapun razia, harus ada analisisnya, dan tentu harus dievaluasi," ungkapnya, Minggu (29/9/2025) Johan juga tak menampik kalau pemilik Capital Building yang berinisial A merupakan sosok berpengaruh di Sumatera Utara, sehingga sangat mungkin razia yang dilakukan telah bocor. "Sehingga razia yang dilakukan sudah terlebih dahulu bocor dan masuk angin. Apalagi razia tidak dilakukan saat weekend (malam Sabtu atau malam Minggu)," pungkasnya, sembari menyec-

butkan dugaan praktik transaksi jual beli narkoba di Capital Building yang ia dengar di salah satu akun media sosial. Terpisah, manajemen Capital Building yang coba dikonfirmasi awak media, hingga saat ini belum memberi tanggapan. Sebelumnya, Tim Gabungan dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Sat Samapta dan Dokes Polrestabes Medan merazia Tempat Hiburan Malam (THM) Capital Building Jl. Putri Hijau Medan, Jumat (26/9). Meski sudah melakukan tes urine terhadap 33 pengunjung dan waiters namun hasil seluruhnya negatif. "Razia dilakukan untuk menjawab sejumlah laporan dari masyarakat yang disampaikan di akun media sosial (medsos) Satres Narkoba Polrestabes Medan. Serta pemberitaan di sejumlah media online," kata Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Thommy Aruan SH SIK MH, Jumat (26/9)

petang. Tim gabungan juga memeriksa seluruh lantai Capital Building, termasuk area KTV hingga Hall. Setidaknya 33 orang dites urinenya, dan seluruhnya dinyatakan negatif sebagai pengguna narkoba. "Ada 33 orang yang dites urine untuk memastikan apakah terdapat indikasi penyalahgunaan narkoba. Hasilnya tidak ditemukan yang positif narkoba berdasarkan hasil tes urine," ungkapnya. Kasatres Narkoba melanjutkan, razia yang dilakukan juga untuk menjawab tuduhan adanya tebang pilih dalam operasinya THM yang genjar dilakukan. Dia menegaskan jika razia THM akan dilakukan di seluruh THM yang ada tanpa tebang pilih. "Kami memastikan tidak ada tebang pilih dalam razia THM. Satu persatu akan kami razia untuk memastikan THM bebas dari praktek penyalahgunaan narkoba," pungkaskan Kasat Res Narkoba.(A-10)

Istana Cabut Kartu Identitas Liputan Wartawan

Dari Halaman 1

Pers Istana atas nama Diana Valencia, 27 September 2025. Tepatnya pukul 19.15 Seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia," kata Titin dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9). Titin mengaku terkejut dan mempertanyakan dasar atau alasan pencabutan ID Pers tersebut. CNN Indonesia telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Mensesneg untuk mempertanyakan

tindakan tersebut. Menurut Titin, pertanyaan jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakangan ini, yaitu isu terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). **Sikap Dewan Pers** Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, menyatakan telah menerima pengaduan terkait pencabutan ID Pers reporter CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepreside-

nan. Komaruddin mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijalankan oleh wartawan di mana pun bertugas. "Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana," kata Komaruddin dalam keterangan tertulis. (.cnni/js)

Di Medan, PAD Bisa Jadi Santapan

Dari Halaman 1

hanya bisa menonton, sambil mengelus dada, karena yang mestinya jadi berkah malah berubah jadi bancakan. Lihatlah rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Medan. Suaranya keras, nadanya tinggi, seolah-olah sedang membela kepentingan rakyat. Tetapi siapa percaya? Banyak yang menduga semua itu hanya sandiwara politik. Hari ini marah-marah, besok sudah diam seribu bahasa. Kenapa? Karena sebagian di antara mereka juga ikut menyantap bancakan yang sama. Satu contoh nyata adalah kasus CityView Condominium. Izinnya dipertanyakan, PAD-nya kabur, DPRD ribut, media memberitakan, tetapi bangunannya tetap berdiri gagah. Kalau

DPRD benar-benar serius, kenapa tidak dibongkar? Kenapa tidak disegel? Kenapa masih saja menjulang di tengah kota? Itu artinya ada yang sudah "deal". Islam sudah lama mengingatkan, jangan makan harta yang bukan hakmu. "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil..." (QS. Al-Baqarah: 188). PAD itu hak rakyat. Kalau ia dicuri, sama artinya dengan merampas hak orang miskin, dengan menelan uang yatim yang seharusnya dilindungi. Ironinya, rakyat tetap harus membayar. Bangun pagar bumi, bayar. Bangun dapur kecil, bayar. Bayar pajak rumah, bayar. Semua dikejar. Tapi pengusaha besar bisa tenang-tenang saja. Gedungnya berdiri, izinnya setengah jalan, PAD menguap entah ke mana. Rakyat yang membayar,

pejabat yang kenyang. Begitulah kalau hukum bisa dibeli. Yang kaya selalu punya jalan, yang miskin selalu dihadang. Negeri ini sakit bukan karena kurang aturan, melainkan karena aturan itu sendiri diperjualbelikan. Kalau PAD terus bocor, jangan harap Medan bisa maju. Jangan kaget bila sekolah rusak tak pernah diperbaiki, jalan berlubang dibiarkan, Puskesmas selalu kekurangan obat. Uangnyanya sudah habis sebelum sampai ke kas daerah. PAD mestinya jadi berkah, tetapi di Medan ia berubah jadi santapan. Satu potong untuk pejabat, satu potong untuk dewan, sisanya remah untuk rakyat. Dan percayalah, Allah tidak akan memberkahi kota yang dibangun dari uang haram. Gedung boleh menjulang tinggi, tapi jika moral pejabatnya runtuh, maka sebenarnya kota ini sedang digerogoti dari dalam.(*)

Agus Suparmanto Jadi

Dari Halaman 1

Pimpinan Wilayah) maupun DPC (Dewan Pimpinan Cabang) se-Indonesia. Salah satu dukungan terhadap Agus Suparmanto datang dari DPW Sumatera Utara, Jafaruddin Harahap. Usai ditetapkan sebagai Ketum Terpilih, Agus Suparmanto diberikan kesempatan menyampaikan sambutanny di hadapan para Muktamirin se-Indonesia. Selanjutnya Agus Suparmanto menerima Bendera Pataka dan berfoto bersama dengan para ketua DPW dan Ketua DPC se-Indonesia. Hadir dalam penetapan tersebut, H. Romahurmuzy dan senior PPP lainnya. **Ketua PPP Sumut Salah Satu Formatur** Usai pemilihan Ketua Umum PPP, selanjutnya dibentuk Tim Formatur untuk menyusun komposisi kepemimpinan DPP PPP periode 2025-2030 bersama Ketum DPP PPP Agus Suparmanto. Dan, Ketua DPW PPP Sumut Jafaruddin Harahap terpilih masuk dalam Tim Formatur tersebut.(gnt/js)

Pemerintah Evaluasi

Dari Halaman 1

disapa Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Minggu. Hal tersebut, ujar dia melanjutkan, merupakan salah satu poin pembahasan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis. Selain mengevaluasi juru masak, langkah yang ditempuh pemerintah untuk menindaklanjuti kasus keracunan MBG sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa setiap makanan dalam MBG ke depan terjamin keamanannya adalah menutup sementara SPPG yang bermasalah. Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah juga mewajibkan SPPG untuk mensterilisasikan seluruh alat makan, termasuk memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan alur limbah. SPPG pun diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS) untuk memastikan semua satuan itu memenuhi standar kebersihan dan pembuatan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemudian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengoptimalkan puskesmas dan usaha kesehatan sekolah (UKS) untuk ikut mengambil peran aktif dalam memantau setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara rutin. Diketahui, rapat koordinasi itu diikuti oleh sejumlah pimpinan kementerian/lembaga. Selain Zulhas, rapat dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Ada pula Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angka Raka Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza UI Haq, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang.(cnni/js)



PPP Krisis Pemimpin

Dari Halaman 1

isme musyawarah yang matang. Ketika suara protes dan ketidakpuasan justru meledak dalam forum resmi, hal itu menandakan adanya faksi yang tidak merasa terwakili, atau tidak percaya pada proses yang sedang berjalan. Dalam politik, perbedaan wajar, tetapi ketika tidak bisa dikelola, perbedaan berubah menjadi konflik terbuka. Kedua, keriuhan ini mencerminkan krisis kepemimpinan. Sejak awal berdirinya, PPP dibangun di atas semangat persatuan sebagai kekuatan Islam NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Semangat itu seharusnya dirawat melalui kepemimpinan yang inklusif, mampu menampung aspirasi beragam arus. Namun, ketika kepemimpinan gagal memberi rasa keadilan, muktamar pun kehilangan wibawa. Publik melihat bahwa elite PPP tidak cukup kuat menjaga martabat forum tertinggi partai. Ketiga, peristiwa ini memberi dampak serius terhadap citra PPP di mata publik. Partai Islam semestinya membawa teladan musyawarah, teduh, dan menjunjung akhlak politik. Ketika muktamar justru ricuh, publik bisa menilai PPP masih sibuk mengurus kepentingan internal, bukan kepentingan umat. Citra inilah yang berbahaya, karena dalam politik elektoral, persepsi publik jauh lebih menentukan dibandingkan sekadar argumen internal. Keempat, ricuhnya muktamar menjadi ujian berat menjelang pemilu. Sebagai partai parlemen dengan suara yang kian menurun, PPP sebenarnya dituntut untuk bekerja ekstra keras membangun kepercayaan pemilih muda, merumuskan agenda politik yang relevan, dan menegaskan kembali positioning di tengah kompetisi partai-partai Islam maupun nasionalis. Namun, keriuhan muktamar justru menguras energi, memperlebar jurang antarfaksi, dan memperlambat proses konsolidasi menuju pemilu. Jika tidak segera diatasi, perpecahan internal berpotensi menjadikan PPP kehilangan basis tradisionalnya. Generasi muda yang tumbuh dalam era politik digital cenderung alergi pada partai yang hanya menampilkan konflik tanpa visi. Mereka lebih memilih partai yang tampil segar, modern, dan punya agenda konkret. PPP bisa semakin terpinggirkan bila tidak mampu mengelola konflik internal menjadi momentum pembaruan. Namun, di balik keriuhan ini, sebenarnya ada peluang. Muktamar dapat dijadikan momentum refleksi: apakah PPP masih ingin bertahan sebagai partai yang sekadar menjaga sejarah, atau bertransformasi menjadi partai Islam yang modern, profesional, dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Untuk itu, rekonsiliasi internal harus menjadi prioritas utama. Elit partai harus berani menanggalkan ego faksi dan kembali ke semangat persatuan sebagaimana dipesankan para pendiri.

Keriuhan hanyalah gejala. Substansi yang lebih dalam adalah krisis kepercayaan. Jika PPP ingin bertahan, ia harus menjawab dua hal: bagaimana membangun kepercayaan internal agar semua kader merasa terwakili, dan bagaimana membangun kepercayaan publik agar partai ini dipandang layak menjadi saluran aspirasi umat. Tanpa menjawab dua hal tersebut, ricuh di muktamar hanya akan menjadi simbol kejatuhan lebih lanjut. Muktamar sejatinya adalah ruang untuk menyatukan visi. Jika ricuh masih mendominasi, PPP harus sadar: publik kini menjadi hakim yang lebih keras daripada lawan politik. Dalam era keterbukaan informasi, setiap keriuhan cepat menyebar, membentuk citra, dan memengaruhi pilihan. Karena itu, keriuhan di muktamar ini semestinya menjadi alarm keras bahwa waktu bagi PPP untuk berbenah kian sempit. PPP masih punya peluang untuk bangkit, tetapi hanya jika mampu menjadikan muktamar sebagai ruang rekonsiliasi, bukan arena konflik. Jika tidak, sejarah panjang partai Islam ini bisa saja berakhir sebagai catatan masa lalu, bukan kekuatan politik masa depan.